

Available online at: prosiding.relawanjurnal.id/index.php/comdev
Proceeding of Community Development
Volume 2 (2018): 268-277; DOI: https://doi.org/10.30874/comdev.2018.319
"Memperkuat Produktivitas untuk Ketahanan Ekonomi Nasional"

TIPE ARTIKEL: ARTIKEL PENELITIAN

Integration of Community Empowerment Models [Pengintegrasian Model Pemberdayaan Masyarakat]

M Chairul Basrun Umanailo
Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Iqra Buru, Namlea, Indonesia
chairulbasrun@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to identify the community empowerment which was held in the Buru Regency since the year 2005 to 2014. The results of the identification into a material formulation to find the model of empowerment that is more flexible and the substance. The approach used in this research using methods qualitative with the approach of the description, determination of informants using purposive with consideration of the informants is considered as related parties to achieve the research objectives. The research was conducted in 8 villages randomly selected by considering the characteristics of the community in the Buru Regency. This study uses data collection techniques of observation, in-depth interviews and focuses group discussions. Data analysis technique used to follow the concept of Miles, Huberman, and Spradley. The results of the analysis of the data shows during the period 2005-2014 the implementation of empowerment in Buru Regency has not yet reached the value of the substance is visible of the low level of community understanding of the program overlapping the implementation of the program and the regional center as well as the dependence of the program on the system of budgeting. The results of the formulation of the empowerment model indicate there need to be changed in the pattern of implementation of the empowerment program, namely the integration of community empowerment programs at the level of structure and operation. Hall program becomes central to the implementation of the program in a top-down and vice versa as well as have channels to avoid the buildup of empowerment programs in the area. Thus, the expected empowerment program more flexible to achieve the values of substantial and able to provide a solution to the problem of poverty.

Keywords: Integration; Empowerment; Community; Model; Buru.

Abstrak

Tujuan penelitian ini mengidentifikasi pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Buru semenjak tahun 2005-2014. Hasil identifikasi menjadi bahan rumusan untuk menemukan model pemberdayaan yang lebih fleksibel dan subtansial. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskripsi, informan yang akan diwawancarai diambil secara purposive dengan pertimbangan informan dianggap sebagai pihak yang terkait untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian dilakukan di 8 desa yang dipilih secara acak dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat di Kabupaten Buru. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam serta focus grup diskusi. Teknik analisa data yang digunakan mengikuti konsep Miles, Huberman dan Spradley. Hasil analisa data menunjukan selama kurun waktu 2005-2014 pelaksanaan pemberdayaan di Kabupaten Buru belum mencapai nilai subtansi terlihat dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program, tumpang tindih pelaksanaan program pusat dan daerah serta ketergantungan program terhadap sistem pengganggaran. Hasil rumusan model pemberdayaan mengindikasikan perlu ada perubahan pola pelaksanaan program pemberdayaan yakni dengan pengintegrasian program pemberdayaan masyarakat pada tingkatan struktur maupun operasional. Hall program menjadi sentral untuk pelaksanaan program secara top down maupun button up serta memiliki kanalisasi untuk menghindari penumpukan program pemberdayaan di daerah. Dengan demikian, diharapkan program pemberdayaan lebih fleksibel untuk mencapai nilai subtansial dan mampu memberikan penyelesaian terhadap masalah kemiskinan.

Copyright © 2018, M Chairul Basrun Umanailo
ISSN 2615-2924 (online)

Kata Kunci: Pengintegrasian; Pemberdayaan; Masyarakat; Model; Buru

PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat Buru adalah priortas kebijakan Pemerintah Kabupaten Buru dalam upaya untuk mengatasi kemiskinan menuju pencapaian visi pembangunan Kabupaten Buru yaitu "Kabupaten Buru Yang Maju Menuju Masyarakat Bupolo Yang Sehat, Cerdas, Berahlak, Mandiri dan Sejahtera" (Umanailo, 2015). dimana, pengentasan masyarakat yang tidak mampu/miskin merupakan prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang di Kabupaten Buru. Regulasi untuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui berbagai program atau kegiatan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari berbagai sumber lainnya, termasuk dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN).

Kabupaten Buru merupakan salah satu daerah di Provinsi Maluku dengan tingkat kemiskinan dalam 5 tahun terakhir teridentifikasi cukup tinggi (Umanailo, 2017). Permasalahan kemiskinan ini, secara langsung telah mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buru, khususnya yang berada di pedesaan. Lemahnya keberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan merupakan salah satu indikator permasalahan kemiskinan yang terjadi (Solano Lara, Fernández Crispín, & López Téllez, 2018). Berbagai program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, diketahui belum mampu menjawab berbagai permasalahan kemiskinan. Melalui penelitian yang telah dilakukan, diketahui sejak tahun 2005-2014 sejumlah program pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan di Kabupaten Buru, namun terdapat beberapa permasalahan yang secara langsung berpengaruh terhadap keberlangsungan program tersebut seperti kelompok sasaran, keberlanjutan serta dampak dari program pemberdayaan tersebut.

Dwi Pratiwi Kurniawati dalam kajian tentang pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi menemukan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mojokerto khususnya pada sektor ekonomi yakni berupa bantuan individu dan bantuan kelembagaan belum sepenuhnya berhasil, dominasi dalam pelaksanaan oleh pihak pemerintah daerah membuat program tidak berjalan secara maksimal (Kurniawati, Supriyono, & Hanafi, 2013). Sementara itu, Faizatul Karimah dalam kajiannya mengenai pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat menunjukkan secara adminitrasi dan fungsional pengelolaan alokasi dana desa dijalankan dengan baik, namun secara aplikatif terlihat belum sampai pada makna pemberdayaan masyarakat sesungguhnya (Karimah, Saleh, & Wanusmawatie, 2005). Ketercapaian indikator keberdayaan masyarakat dalam program pemberdayaan fakir miskin dalam penelitian Hairi Firmansyah menunjukan belum tercapainya indikator keberdayaan masyarakat (derajat dan basis keberdayaan) (Firmansyah, 2012) serta Isnan Murdiansyah menunjukan beberapa permasalahan dalam menjalankan program gerakan pendukung pengentasan kemiskinan Kabupaten Malang seperti kurangnya modal, adanya pemotongan dana, kredit yang macet, dominasi aparatur desa, dukungan infrastruktur desa yang masih rendah, dan juga koordinasi diantara pengelola program gerakan pendukung pengentasan kemiskinan di Kabupaten belum maksimal (Murdiansyah, 2014).

Permasalahan diatas, mengindikasikan perlunya perhatian serius dan upaya perbaikan yang mendasar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan sebagai alternatif penyelesaian kemiskinan. Namun, menjadi evaluasi bagi pemerintah bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang selama ini dilaksanakan bukan proses modernisasi dan memacu peningkatan angka produksi saja (Widayanti, 2012). Tetapi, yang terpenting adalah bagaimana mengembangkan iklim yang

Copyright © 2018, M Chairul Basrun Umanailo

ISSN 2615-2924 (online)

kondusif bagi proses pengembangan kegiatan produktif masyarakat berdasarkan potensi yang dimilikinya (Adamson, 2010).

Memahami tipologi masyarakat yang masih terbelakang menyebabkan kemampuan untuk mengakses sumber-sumber penghidupan menjadi sangat minim (Rappaport, 1987). Kondisi seperti ini akan berdampak kepada rendahnya kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan di Kabupaten Buru. Maka itu perlu diberikan treatmen untuk keberlanjutan kehidupan mereka (Saugi & Sumarno, 2015) serta mengadakan penyuluhan, serta pendampingan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, yang diorientasikan kepada masalah ketahanan pangan.

kajian ini dibuat untuk dapat mengidentifikasi pokok masalah sosial ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Buru serta merumuskan model pemberdayaan masyarakat berketahanan pangan. Dengan demikian, yang diharapkan dari output yang dihasilkan adalah sebuah model pemberdayaan untuk peningkatan kemandirian masyarakat.

Penelitian diarahkan untuk melihat secara umum pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Buru. Selain itu, secara deskriptif kajian diarahkan untuk menjelaskan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang sudah ada sebelumnya (Loh & Agyeman, 2018), dengan menggunakan indikator umum, yakni perencanaan, tujuan, proses atau pendekatan program, kesesuaian program dengan kebutuhan, kontinuitas program, peran pendamping dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian akan menjadi suatu pendekatan praktis berupa model pemberdayaan masyarakat terintegrasi. Model tersebut menjadi masukan kepada pengambil kebijakan untuk merumuskan model program pemberdayaan yang tepat berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan Kabupaten Buru.

METODE

Penelitian dilaksanakan pada 8 desa di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Pemilihan lokasi dilakukan secara acak dengan pertimbangan bahwa desa yang dipilih telah mewakili karakteristik masyarakat diantaranya; masyarakat dataran tinggi, dataran rendah serta masyarakat pesisir pantai. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender yang dimulai pada bulan Februari hingga Agustus 2018. Adapun penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif serta pendekatan deskriptif analisis.

Sumber untuk data yang paling diutamakan pada model kualitatif adalah kata dan tindakan, selanjutnya merupakan tambahan seperti hasil foto lapangan, record dan hasil karya yang sejenis. Terkait data, kemudian dapat urai jenis datanya dalam kata-kata maupun apa yang dilakukan, sumber tertulis, dokumentasi dan hasil statistik (Subandi, 2011). Dalam kajian ini, untuk model pengambilan data yang peneliti pakai adalah model wawancara mendalam dan lamgsung dengan informan pada delapan desa sampel serta pengamatan langsung kepada objek penelitian (Krippendorff, Klaus, Wajidi, 1993). Dengan memanfaatkan kebiasaan masyarakat yang suka berkumpul pada malam hari, maka wawancara dilakukan mulai pukul 19.00-23.00 WIT.

Dalam penganalisaan data, peneliti menggunakan di saat kegiatan mengumpulkan data berlangsung, dan juga setelah pada waktu berakhirnya pengumpulan data. Menganalisis data sembari menggumpulkan, peneliti dapat memahami secara khusus kurangnya data yang mesti dikumpulkan dan metode yang harus operasionalkan selanjutnya supaya didapatkan hasil maksimal.

Untuk penyajian data, penulis dapat mengoperasionalkan dengan cepat dan tepat saat pengkodean dan menentukan keputusan didasarkan fokus penelitian. Penyajian data tidak dipisahkan dari analisis data metode kualitatif. Menyajikan data merupakan bagian dari analisis sebagaimana mereduksi data

Copyright © 2018, M Chairul Basrun Umanailo
ISSN 2615-2924 (online)

menjadi bagian dari proses analisis. Menyajikan hasil temuan dalam metode kualitatif, umumnya berbentuk grafik, matrik, teks naratif dan bagan. Menarik kesimpulan adalah proses terakhirr dari analisis data model kualitatif. Penarikan kesimpulan dilaksanakan menggunakan pemaknaan lewat refleksi data (Gumilang, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian masalah masyarakat miskin adalah salah satu orientasi utama pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang di Kabupaten Buru. Regulasi pemberdayaan masyarakat dilaksanakan lewat program maupun kegiatan baik yang berasal dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) ataupun berbagai sumber lain, termasuk juga Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN).

Lewat perencanaan pembangunan yang sistematis dapat diidentifikasi permasalahan pengembangan yang sementara terjadi sehingga dapat direncanakan program pemberdayaan berdasar pada analisisa potensi sosial dan ekonomi ekonomi masyarakat.

Tabel 1. Jenis Lapangan Pekerjaan Utama Penduduk di Kabupaten Buru Tahun 2015

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	14.102	6.421	20.523
Pertambangan dan Penggalian	1.758	167	1.925
Industri Pengolahan	4.001	1.533	5.534
Listrik Gas dan Air	0	0	0
Bagunan	3.245	40	3.285
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	3.743	5.439	9.182
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	3.785	0	3.785
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	508	55	623
Jasa Kemasayarakatan, Sosial dan Perorangan	4.276	3.819	7.438
	35.476	17.474	52.952

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab. Buru 2017

Dari data tabel yang disampaikan, keterbatasan masyarakat menyebabkan ketidakmampuan untuk mengakses sumber penghidupan (resources) menjadi sangat sedikit. Kemiskinan merupakan salah satu indikator ketidakberdayaan masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi (Perkins & Zimmerman, 1995), namun ditengah kondisi sosial ekonomi yang masih di hadapkan pada permasalahan kemiskinan (Painter, Dominelli, MacLeod, Orton, & Pande, 2012) yang secara langsung memiliki dampak pada minimnya kualitas hidup dan pencapaian kesejahteraan di Kabupaten Buru. Perihal kemiskinan di Kabupaten Buru, berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buru dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 meningkat dibanding tahun 2015. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin sebesar 23.440 jiwa. kemudian meningkat di tahun 2016 menjadi 23.530 jiwa (BPS, 2017).

Sebagai salah strategi dalam pembangunan daerah, kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui model pengembangan dan pemberdayaan ekonomi serta ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Buru berbasis kemandirian yang ditujuakn untuk dapat mengurangi mereka dari resiko ketidakmampuan.

Copyright © 2018, M Chairul Basrun Umanailo

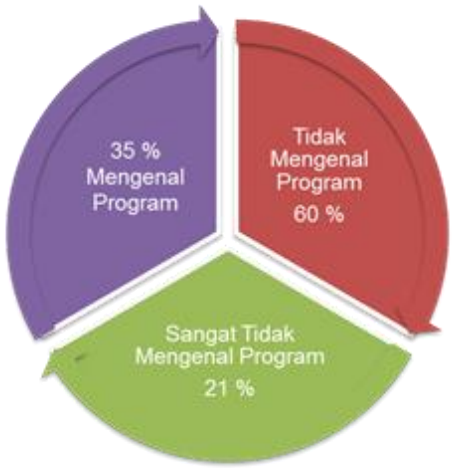
ISSN 2615-2924 (online)

Tabel 2. Pelaksanaan Program Pemberdayaan di Kabupaten Buru

No	Jenis Bantuan	Waktu	Sumber	Bentuk
1	PNPM Mandiri	2007	Pusat	BLM, Pendampingan, Pelatihan
2	PKPS BBM	2005	Pusat	Pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan
4	Program Keluarga Harapan (PKH)	2007	Pusat	Uang untuk pendidikan dan kesehatan
5	Gerdu Taskin	2005	Provinsi	Modal usaha
6	PEMP	2003	Pusat	Peningkatan ekonomi, SDM, penguatan sosial ekonomi masyarakat pesisir.
7	KUBE	-	Pusat	Pengembangan usaha produktif masyarakat
8	SOLID	2014	Pusat	Peningkatan produktivitas sistem pertanian terpadu, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dan gender
9	P2KP	2002	Pusat	Pengentasan kemiskinan
10	Dana Desa	2014	Pusat	Infrastrukutur, Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat
11	PNPM Mandiri KP	2010	Pusat	Bantuan Langsunf Tunai (BLT)
12	PUMP-PB	2012	Pusat	BLT Pengembangan Budidaya Perikanan

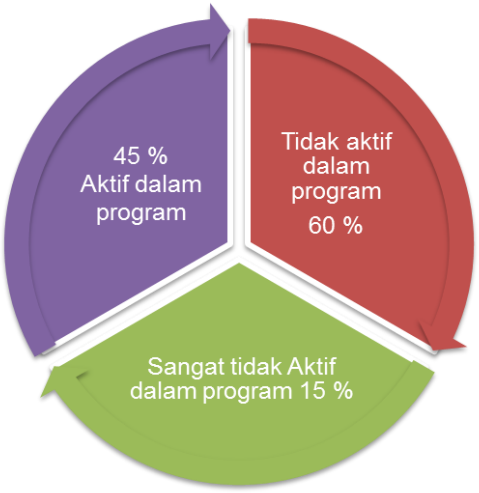
Sumber: Data Primer diolah 2018

Berbagai program pemberdayaan diatas, berdasarkan hasil kajian lapangan menyampaikan untuk faktor keikutsertaan menjadi hal penting dan sangat dominan. keikutsertaan dalam pemahaman keterlibatan kelompok masyarakat tidak mampu pada keseluruhan alur proses pelaksanaan pemberdayaan, mulai identifikasi masalah dan pemenuhan kebutuhan hingga pada pemanfaatan hasil pemberdayaan. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program pemberdayaan dan tingkat pengenalan masyarakat terhadap lembaga/sumber dana pemberdayaan.



Gambar 1. Tingkat Pengenalan Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan

Copyright © 2018, M Chairul Basrun Umanailo
ISSN 2615-2924 (online)



Gambar 2. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Terhadap Program Pemberdayaan



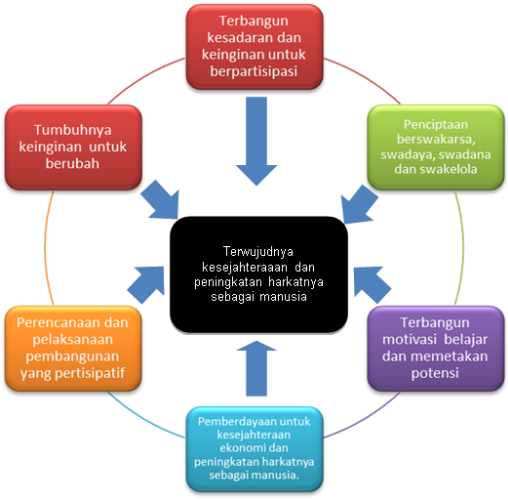
Gambar 3. Keberlanjutan Program Pemberdayaan



Gambar 4. Distribusi Kegiatan Program Pemberdayaan

Copyright © 2018, M Chairul Basrun Umanailo
ISSN 2615-2924 (online)

Berdasarkan ulasan sebelumnya, diketahui bahwa untuk waktu sekarang efektifitas program penyelesaian masalah kemiskinan yang telah dilaksanakan pihak pemerintah secara top-down atau bottom-up dianggap masih belum mencapai hasil maksimal (Yuni Romi & Tinov, 2013). Kondisi ini dipahami akan minimnya tingkat keberhasilan program yang berkarakter top-down akibat masyarakat sasaran untuk pelaksanaan program terabaikan dalam pelaksanaan program dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi menyebabkan masyarakat seperti diberikan hibah atau bantuan dari pemerintah dan sehingga perlu mengembalikan (Firmansyah, 2012). Program dengan model bottom up juga hamper sama, meski pada tingkat kegagalannya lebih minim dibanding program top down.

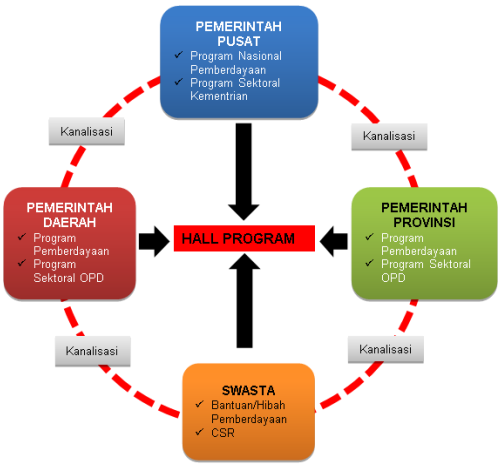


Gambar 5. Kerangka Konsep Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat

Untuk berhasilnya program pemberdayaan masyarakat, aspek kelembagaan (Vijayakumar, 2018) bagi program pemberdayaan masyarakat merupakan daya dukung berikutnya yang sangat penting. Diperlukan kelembagaan yang kuat (Jurkowski, Lawson, Green Mills, Wilner, & Davison, 2014), mengakar (Ramos & Prideaux, 2014) dan representatif (Constantino et al., 2012) bagi program pemberdayaan masyarakat yang mampu mensinergikan seluruh stakeholder dalam program pemberdayaan masyarakat (pemerintah & non pemerintah) dan juga mampu mampu menjadi motivator di masyarakat menuju perubahan yang lebih baik. Selanjutnya agar upaya pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik, hadirnya program sangat diperlukan.

Tujuan yang paling utama dalam pelaksanaan pembangunan ialah masyarakat yang mampu untuk berdaya atau keberdayaan, kemampu atau kekuatan an (Eger, Miller, & Scarles, 2018). Kekuatan yang dimaksudkan dapat ditinjau dari aspek material dan fisik, kelembagaan, ekonomi, kerjasama, komitmen dan kekuatan intelektual bersama untuk menerapkan prinsip pemberdayaan (Widjajanti, 2011). Pada gambar 5 diatas, menunjukan skema yang dibangun merupakan keterpaduan antara kekuatan kelembagaan dan sumberdaya manusia. secara umum grand desain mengilustrasikan adanya hilirisasi program pada hall program dimana focus keseluruhan kegiatan berada pada kendali hall program.

Copyright © 2018, M Chairul Basrun Umanailo
ISSN 2615-2924 (online)



Gambar 6. Elaborasi Kelembagaan Model Pemberdayaan Masyarakat

Sumber-sumber pemberdayaan yang berasal dari pihak swasta, pemerintah pusat serta pemerintah provinsi (Noor, 2011) terkanalisasi menuju pada hall program dan begitu pula dengan sumber-sumber pemberdayaan yang berasal dari pemerintah Kabupaten Buru ikut terkanalisasi menuju hall program. Hal ini dimaksudkan untuk membuat keterpaduan dan adanya akselerasi pengelolaan program-program pemberdayaan secara integral (Wijaya, 2010), sehingga apa yang direncanakan dan yang ingin dihasilkan tidak terjadi secara parsial.

Elaborasi kelembagaan merupakan gambaran pokok mengenai sirkulasi dan jalur distribusi pengelompokan dan pengusulan dari program program pemberdayaan yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah serta dari pihak swasta.

Pemberdayaan dari pihak swasta berupa bantuan program maupun dana CSR, dalam pelaksanaannya harus terkanalisasi agar dalam perencanaan dan pelaksanaan lebih terfokus pada kelembagaan yang menjalani program tersebut. Begitu pula berbagai program yang dating dari pihak pemerintah pusat dalam hal ini kementerian maupun lembaga setingkat menteri, dan pemerintah propinsi, perlu diadakan kanalisasi program yang mengarah pada hall program.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan diperlukan nilai-nilai untuk dapat berdiri sendiri dalam masyarakat dan juga menjadi kekuatan untuk berdaya, seperti nilai kejuangan, nilai kekeluargaan, kegotong-royongan, dan keutamaan masyarakat kita adalah kebinekaan. Kemampuan untuk berdaya dari masyarakat adalah unsur yang sangat dimungkinkan kepada konstruksi masyarakat yang bertahan (survive), dalam pemahaman yang dinamis untuk pengembangan diri mencapai kemajuan. Kemampuan untuk bisa berdiri sendiri bagi masyarakat menjadi sumber pada dalam wawasan politik tingkatan nasional disebut ketahanan nasional.

SIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan untuk perubahan. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk memberikan kemampuan sekaligus kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan. Salah satu dampak positif pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, yaitu masyarakat mampu mengambil tanggungjawab terhadap pekerjaan mereka. Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan.

Copyright © 2018, M Chairul Basrun Umanailo

ISSN 2615-2924 (online)

Kabupaten Buru merupakan salah satu daerah di Propinsi Maluku dengan potensi sumberdaya alam yang cukup melimpah disertai dengan kekuatan budaya lokal yang menunjang kehidupan bermasyarakat untuk pencapaian kesejahteraan. Dari awal terbentuk hingga saat ini sudah cukup banyak program-program pemberdayaan masyarakat yang diberikan baik oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Program-program pemberdayaan yang berbasis individu maupun kelompok sebagai upaya pembangunan masyarakat cenderung tumpang tindih dalam satu wilayah pelaksanaan, kurangnya kosentrasi dan pemufokusan terhadap proses dan luaran serta dampak dari program-program yang dilaksanakan sehingga yang terjadi selama ini adalah pemberdayaan dalam bentuk parsial dan kurang adanya sinkronisasi serta verifikasi database individu maupun kelompok sasaran.

Lemahnya sinkronisasi data dan jejaring program kerja membuka peluang untuk terjadi pelemahan program yang berdampak pada capaian target sehingga program pemberdayaan lebih banyak berhenti pada proses pelaksanaan dan kelompok sasaran.

Model pemberdayaan terintegrasi merupakan temuan model pelaksanaan yang dibagi menjadi dua bagian yakni secara kelembagaan dan operasional untuk mempermudah proses pelaksanaan kegiatan dan penyusunan berbagai instrument. Model pemberdayaan terintegrasi mempermudah inisiasi masyarakat untuk menyampaikan usulan serta merangsang kreatifitas individu maupun kelompok sasaran dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Hall program menjadi sentral pelaksanaann program yang pada nantinya mengintegrasikan inisiasi, proses pelaksanaan hingga monitoring dan pelaporan akhir pemberdayaan masyarakat Tim Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi pilar penting untuk proses pelaksanaan dan pendampingan terhadap individu mapun kelompok sasaran di masing-masing desa. Sumber utama inisiasi berasal dari masyarakat yang terstruktur hingga ke hall program yang terbagi menjadi inisiasi internal dan sharing program terhadap Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun pihak swasta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pemerintah Kabupaten Buru dalam hal ini Badan Perencanaan Daerah yang memfasilitasi penelitian dengan dukungan anggaran project tahun 2018 serta Pusat Studi Perencanaan dan Pembangunan Masyarakat Universitas Iqra Buru yang memberikan fasilitas selama penelitian.

REFERENSI

Adamson, D. (2010). Community empowerment. International Journal of Sociology and Social Policy.

Constantino, P. de A. L., Carlos, H. S. A., Ramalho, E. E., Rostant, L., Marinelli, C. E., Teles, D., … Valsecchi, J. (2012). Empowering local people through community-based resource monitoring: A comparison of Brazil and Namibia. Ecology and Society.

Eger, C., Miller, G., & Scarles, C. (2018). Gender and capacity building: A multi-layered study of empowerment. *World Development*, 106, 207–219.

Firmansyah, H. (2012). Ketercapaian Indikator Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) di Kota Banjarmasin. *Jurnal Agribisnis Perdesaan*, 02(02), 172–180.

Gumilang, G. S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling Volume.*

Jurkowski, J. M., Lawson, H. A., Green Mills, L. L., Wilner, P. G., & Davison, K. K. (2014). The empowerment of low-income parents engaged in a childhood obesity intervention. Family and Community Health.

Copyright © 2018, M Chairul Basrun Umanailo
ISSN 2615-2924 (online)

Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2005). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP),* 2(4), 597–602.

Krippendorff, Klaus, Wajidi, F. (1993). *Analisis isi: pengantar teori dan metodologi (1st ed.).* Jakarta: Citra Niaga Rajawali Pers.

Kurniawati, D. P., Supriyono, B., & Hanafi, I. (2013). Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik,* I(4), 9–14.

Loh, P., & Agyeman, J. (2018). Urban food sharing and the emerging Boston food solidarity economy. Geoforum, (August), 0–1.

Murdiansyah, I. (2014). Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang). *Jurnal WIGA*, 4(1), 71–92.

Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Ilmiah CIVIS.*

Painter, J., Dominelli, L., MacLeod, G., Orton, A., & Pande, R. (2012). Connecting Localism and Community Empowerment. Arts and Humaities Research Council.

Perkins, D. D., & Zimmerman, M. A. (1995). Empowerment theory, research, and application. American *Journal of Community Psychology.*

Ramos, A. M., & Prideaux, B. (2014). Indigenous ecotourism in the Mayan rainforest of Palenque: empowerment issues in sustainable development. Journal of Sustainable Tourism.

Rappaport, J. (1987). Terms of empowerment/exemplars of prevention: Toward a theory for community psychology. *American Journal of Community Psychology*.

Saugi, W., & Sumarno, S. (2015). Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan pengolahan bahan pangan lokal. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat,* 2(2), 226.

Solano Lara, C., Fernández Crispín, A., & López Téllez, M. C. (2018). Participatory rural appraisal as an educational tool to empower sustainable community processes. *Journal of Cleaner Production*, 172, 4254–4262.

Subandi. (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. Harmonia.

Umanailo, M. C. B. *(2015). Masyarakat Buru Dalam Perspektif KontemporeR (Kajian Kritis Perubahan Sosial di Kabupaten Buru). (1, Ed.).* Namlea: Mega Utama.

Umanailo, M. C. B. (2017). *Kalesang Desa dalam Konteks Membangun dari Desa. In Sinergitas Unsur Pentaheliks Bagi Pengembangan Sumberdaya Manusia (pp. 422–438).* Ambon: Ikatan Dosen Republik Indonesia.

Vijayakumar, G. (2018). Collective demands and secret codes: The multiple uses of "community" in "community mobilization." World Development, 104, 173–182.

Widayanti, S. (2012). Pemberdayaan Masyarakat : Pendekatan Teoritis. Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.

Wijaya, M. (2010). Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik.

Yuni Romi, & Tinov, M. Y. T. (2013). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. *Jurnal Administrasi Pembangunan.*

Copyright © 2018, M Chairul Basrun Umanailo

ISSN 2615-2924 (online)